



Media Massa : *Harjo* Hari : *Kamis* Tanggal : *29 Juli '10* Halaman : *14*

Terima penghargaan pelaporan keuangan dari Wapres Boediono

Kota raih standar tertinggi BPK

A. Adi Prabowo
 HARIAN JOGJA

JOGJA: Pemerintah Kota Jogja menerima penghargaan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden Boediono dan diterima oleh Wakil Walikota Jogja Haryadi Suyuti di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (27/7).

Hal itu dijelaskan Kepala Bagian Humas Kota Jogja Herman Edi Sulistyono saat dihubungi *Harian Jogja*, Rabu (28/7). Dikatakan Herman, setelah menerima penghargaan tersebut Wakil Walikota Haryadi Suyuti menyatakan penghargaan tersebut menjadi dasar bagi pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik di masa yang akan datang.

"Penghargaan ini adalah pencapaian yang sangat membanggakan bagi Kota Jogja dan harus menjadi pemicu semangat bagi Pemerintah Kota Jogja untuk selalu menjalankan tata kelola keuangan yang sudah baik ini," kata Haryadi dalam pernyataan yang disampaikan dalam rilis yang diterima *Harian Jogja*, kemarin.

Penghargaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah tersebut dicapai setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai bahwa laporan keuangan daerah Pemerintah Kota Jogja pada anggaran 2009 adalah wajar tanpa pengecualian. "Penilaian wajar tanpa pengecualian tersebut adalah pencapaian standar penilaian tertinggi dari BPK," lanjutnya.

- Dihaturkan Kepada
1. Walikota
 2. Wakil Walikota
 3. Sekretaris
 4. Asisten

Tembusan Kepada

Jogja menerima penghargaan tersebut bersama dengan 45 lembaga pemerintah

dan 13 pemerintah daerah, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Banda Aceh, Pemerintah Kota Sabang, Pemerintah Kota Lhokseumawe, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sungsai Penuh, Pemerintah Kabupaten Muko-Muko, Pemerintah Kabupaten Kaur, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Pada 2006, BPK memberikan penilaian wajar tanpa pengecualian pada tiga laporan keuangan pemerintah daerah atau satu persen dari total pemerintah daerah yang ada di Indonesia.

Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan daerahnya pada 2008 meningkat menjadi 12 pemerintah daerah dan kembali bertambah pada 2009 sebanyak 13 pemerintah daerah.

Ketua BPK Hadi Poernomo, seperti dikutip *Antara* menyatakan, laporan keuangan daerah yang berkualitas bukan dihasilkan dengan cara-cara instan tetapi melalui sistem akuntansi yang baik dan data yang dapat ditelusuri.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. DDPDK	<input type="checkbox"/> Menonjol	<input type="checkbox"/> Amat Penting	<input type="checkbox"/> Harus ditanggapi



PENGHARGAAN: Wakil Walikota Jogja Haryadi Suyuti (kiri) saat menerima penghargaan dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan dari Wakil Presiden Boediono, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (27/7).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005